BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

International Energy Agency (IEA) mendefinisikan keamanan energi *(energy security)* bukan hanya tentang memiliki akses yang tidak terputus ke energi, tetapi juga tentang memastikan pasokan energi tersedia dengan harga yang terjangkau (IEA, 2022). Keamanan energi selalu berkaitan dengan pengadaan bahan bakar primer yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, yang diperkirakan akan lebih menantang di masa depan karena meningkatnya permintaan global, persaingan negara-negara untuk mendapatkan akses ke pasokan yang tersedia, dan kebutuhan untuk mengatasi iklim yang semakin meningkat (Klare, 2018). Tantangan struktural tersebut tercermin dari tren konsumsi energi global yang terus meningkat dan ketidakseimbangan pada sumber energi. Pada tahun 2023 saja, konsumsi energi global mencapai rekor tertinggi sebesar 620 *exajoule*, yang didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil atau *brown energy* dengan total sebesar 81% dan sisanya merupakan energi terbarukan (MSCI, 2023). Namun, angka tersebut tidak sebanding dengan penggunaan energi terbarukan dunia yang hanya mencapai 90,23 *exajoule* pada tahun yang sama. Keamanan energi dapat menjadi isu strategis dan krusial terutama bagi negara-negara dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi seperti Jepang.

Pencapaian keamanan energi di Jepang selalu berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mengupayakan diversifikasi dan efisiensi energi untuk menjamin

stabilitas rantai pasokan. Menurut IEA, konsumsi energi di Jepang pada tahun 2022 paling banyak digunakan untuk sektor industri sebesar 29,1%, transportasi 24,9%, lalu diikuti oleh sektor perumahan, lalu pelayanan komersial dan publik (IEA, 2025). Pada tahun 2023, sekitar 87% dari total konsumsi energi Jepang berasal dari bahan bakar fosil, dengan *Liquid Natural Gas* (LNG) menyumbang 38%, batu bara 31%, dan minyak bumi 18% (IEA, 2025). Sementara itu, pada tahun yang sama energi nuklir hanya mampu menyumbang sekitar 7,7% dan energi terbarukan menyumbang sekitar 22,3% pada bauran energi nasional, jauh dari target 36-38% untuk tahun 2030 (World Nuclear Assocation, 2025). Data energi terbarukan *(renewable energy)* tersebut merujuk kepada akumulasi dari tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, dan biomassa. Sedangkan energi nuklir yang menyumbang sedikit pasokan energi Jepang lebih sering diistilahkan sebagai *clean energy.* Hal ini dikarenakan unsur uranium yang ditambang dari dalam tanah dianggap tidak terbarukan, serta dengan tantangan pada aspek keselamatan dan masalah pembuangan limbah radioaktif yang belum terselesaikan mencegahnya masuk sejajar dengan *renewable energy* (Podoba, 2021). Meskipun energi nuklir hanya menyumbang sedikit proporsi pada bauran energi nasional, namun pengembangannya telah menjadi bagian integral dari upaya diversifikasi energi nasional serta membentuk identitas tersendiri bagi Jepang.

Sebagai negara dengan keterbatasan sumber daya alam, Jepang memerlukan strategi pemanfaatan energi yang optimal guna menjaga keberlangsungan dan ketahanan negara. Dengan lonjakan kebutuhan energi untuk industri berat dan perkotaan, Jepang memerlukan energi alternatif yang dapat diproduksi di dalam

negeri dengan pasokan yang masif dan stabil. Kembali pada tahun 1970 hingga 1990-an ketika permintaan listrik domestik semakin meningkat, Jepang sebagai *resource-poor country* dan terisolasi secara spasial dari negara-negara tetangganya, melihat tenaga nuklir sebagai jawaban politik yang tepat untuk memastikan keamanan energi dibandingkan dengan sumber energi konvensional lainnya (Wieczorek, 2019). Mengutip dari Rekik & El Alimi (2024), tenaga nuklir beroperasi secara independen dari kondisi cuaca, memberikan keluaran energi yang konsisten, melengkapi sifat intermiten dari sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari, dan menghasilkan sedikit emisi gas rumah kaca, menjadikannya alternatif yang handal dan terukur untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan energi dan tujuan dekarbonisasi (Khaleel et al., 2025). Selain kelebihan tersebut, pada saat yang sama Jepang juga mulai mengalami "kecemasan energi", yang muncul tidak hanya karena tingginya ketergantungan Jepang pada minyak dan gas Timur Tengah, tetapi juga karena meningkatnya persaingan di pasar energi Asia akibat peralihan Cina dari negara pengekspor minyak menjadi pengimpor minyak terbesar di dunia pada tahun 1993 (Cherp et al., 2017). Faktor-faktor tersebut kemudian berkontribusi terhadap penempatan energi nuklir sebagai prioritas strategis nasional hingga mampu menghasilkan sekitar 30% energi untuk listrik di Jepang pada tahun 2011.

Sejak awal tahun 2000-an, kebijakan energi nasional Jepang dibangun berdasarkan prinsip 3Es yaitu *energy security, economic efficiency,* dan *environenmental sustainability,* yang memiliki tujuan utama untuk mencapai stabilitas pasokan dan kemandirian energi tanpa memicu resistensi sosial yang

berkelanjutan. Pada tahun 2010, komposisi bauran energi nasional Jepang ditopang oleh gas alam (28%), batu bara (27%), tenaga nuklir (25%), energi terbarukan (10%), minyak bumi (8%), dan sisanya dari energi lain (Zissler, 2019). Namun, upaya Jepang dalam mencapai pasokan energi yang stabil harus menghadapi tantangan akibat kecelakaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi pada tahun 2011. Pemerintah Jepang harus mengambil langkah penanganan konstan dengan mengalihkan sumber daya darurat sepenuhnya kepada energi fosil, untuk menutupi hilangnya 30% energi nuklir sebagai dampak kecelakaan tersebut. Akibatnya hingga tahun 2022, tingkat ketergantungan Jepang terhadap impor energi fosil mencapai lebih dari 80%, sehingga menjadikan keamanan energi Jepang sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan kondisi geopolitik internasional. Mengingat energi berperan sebagai fondasi bagi aktivitas ekonomi, industri, dan kehidupan masyarakat, setiap gangguan terhadap pasokan energi berpotensi mengancam stabilitas ekonomi nasional serta keamanan negara secara keseluruhan.

Kerentanan struktural sektor energi Jepang tersebut menjadi semakin nyata ketika dinamika geopolitik mengalami disrupsi akibat invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang terjadi selama masa jabatan Perdana Menteri Fumio Kishida. Invasi tersebut menyebabkan lonjakan harga energi global yang berdampak pada sektor energi dan ekonomi domestik Jepang. Bagi Jepang, peristiwa tersebut berfungsi sebagai titik krisis *(critical juncture)* yang memperjelas kekhawatiran nasional terhadap *supply* pasokan energi dan menunjukkan bagaimana kondisi ketergantungan yang tinggi pada energi impor dapat berubah menjadi ancaman

nyata terhadap keamanan nasional. Selaras dengan tulisan Ramadhan (2023), dari sudut pandang negara pengimpor dengan keterbatasan cadangan energi, ancaman utama keamanan energi terletak pada resiko kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, karena gangguan pasokan minyak bumi dapat langsung menyebabkan kekurangan energi atau membuat harga energi fosil tidak lagi terjangkau (Ramadhan, 2023).

Invasi tersebut memberikan tekanan yang signifikan bagi pemerintahan Kishida dalam mewujudkan pasokan energi yang stabil dan aman. Pada bulan Juli 2022, PM Kishida menggarisbawahi tantangan terhadap keamanan energi yang ditimbulkan oleh invasi Rusia ke Ukraina sebagai *"We are currently facing an extremely tense situation, with the risk of the first energy crisis since the oil shock in 1973"* (Hanssen & Koppenborg, 2023). Tekanan lain juga datang dari komunitas internasional akibat laju transisi energi di Jepang yang dinilai lambat dengan angka ketergantungan yang cukup tinggi terhadap energi fosil. Hal ini membuat Jepang harus menyesuaikan kembali arah kebijakan dan strategi nasional guna memastikan pasokan energi tetap aman dan stabil, serta memenuhi target dekarbonisasi. Pidatonya di Sesi ke-210 Diet Jepang pada Oktober 2022, Kishida secara tegas menyatakan *"... to ensure a stable supply of energy, upon which green transformation is premised, we will squarely take on the issue of nuclear power, in light of the energy crisis that Russia's outrageous acts have caused"* (Prime Minister's Office of Japan, 2022). Pidato Kishida tersebut tidak hanya merujuk invasi Rusia sebagai subjek yang menyebabkan disrupsi energi, tetapi juga menunjukkan upaya Kishida dalam mengonstruksikan tindakan Rusia sebagai

sebuah ancaman terhadap eksistensi. Disrupsi energi tersebut mendorong pemerintah untuk mereaktivasi pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai solusi konstruktif untuk menghadapi potensi krisis yang muncul. Kishida kemudian meletakkan rencana reaktivasi tersebut ke dalam bagian dari inisiatif Green Transformation (GX) pada akhir tahun 2022.

Green Transformation (GX) bertujuan untuk mempercepat transisi ke energi bersih dengan menginvestasikan dana publik-swasta sekitar $1 triliun untuk pengembangan amonia/*hydrogen co-firing*, CCUS *(Carbon Capture, Utilization, and Storage),* serta memulai kembali proyek nuklir. Secara sederhana, inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap melakukan mitigasi emisi dan mengamankan pasokan energi. Fumio Kishida mengambil langkah yang lebih proaktif dengan meletakkan energi nuklir ke dalam kerangka kerja inisiatif GX, sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi dan pencapaian keamanan energi nasional. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap penetapan target untuk memasok 20%-22% listrik Jepang dari energi nuklir pada 2030, juga rencana untuk memperpanjang usia reaktor nuklir yang semula sekitar 40 tahun, menjadi setidaknya 60 tahun. Meskipun insisiatif tersebut juga memasukkan kerangka kerja bagi pengembangan energi terbarukan, namun terlihat jelas bahwa pemerintah memiliki preferensi yang lebih besar terhadap pengembangan PLTN. Dibandingkan dengan proyek-proyek terdahulu, inisiatif GX menunjukkan adanya peningkatan intensitas dari pemerintah Jepang dalam upaya menjaga keamanan energi di tengah disrupsi energi global, meskipun beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang energi dan iklim seperti Friends of the Earth (FOE) Japan dan

350.org, menilai inisiatif ini kurang ambisius dan menyebutnya sebagai skema *greenwashing*.

Bagi Jepang, upaya diversifikasi energi memiliki tantangan yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya karena selain mempertimbangkan kondisi geografis, pemerintah harus berhadapan dengan resistensi publik terhadap rencana untuk penggunaan kembali reaktor nuklir yang dipilih sebagai solusi alternatif. Kecelakaan Fukushima Daiichi pada tahun 2011 telah menyebabkan opini publik terhadap pembangkit listrik energi nuklir mengalami penurunan yang signifikan. Menurut hasil survei Asahi Shimbun pada tahun 2007, sebanyak 53% suara ingin tetap mempertahankan pasokan energi dari tenaga nuklir, 13% suara ingin meningkatkan PLTN, 21% ingin mengurangi ketergantungan terhadap energi nuklir, dan hanya 7% suara masyarakat Jepang ingin menghentikan tenaga nuklir sepenuhnya (Penney, 2012). Namun survei Asahi Shimbun pada Juni 2013, dua tahun pasca kecelakaan, menunjukkan penurunan yang cukup besar pada dukungan publik menjadi hanya sekitar 28%, dan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penolakan energi nuklir menjadi 58% (World Nuclear News, 2023). Peningkatan opini negatif tersebut dikarenakan kekhawatiran yang meluas terhadap keamanan dan keselamatan pada pembangkit listrik tenaga nuklir.

Resistensi publik Jepang terhadap pengembangan energi nuklir bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, ketika tahun-tahun awal pengembangannya pada 1954, pembangunan reaktor nuklir mengalami tantangan akibat penolakan dan persepsi masyarakat lokal, LSM, dan akademisi (Sarjiati,

2015). Rencana pemerintah dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir harus berhadapan dengan sentimen anti nuklir yang kuat pada masyarakat Jepang, akibat pengalaman historis pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II. Sentimen antinuklir didominasi oleh kekhawatiran terhadap pengembangan dan penggunaan nuklir sebagai sebuah senjata. Namun, guncangan minyak *(oil shock)* pada tahun 1973 dan kebutuhan terhadap sumber energi yang stabil untuk mendukung kebangkitan industrialisasi Jepang pada saat itu berperan dalam merubah persepsi dan penerimaan masyarakat menjadi lebih positif.

Kondisi akibat pemboman Hiroshima dan Nagasaki serta krisis minyak pada tahun 1973 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap energi nuklir sangat dipengaruhi oleh konteks krisis dan ancaman yang dihadapi oleh Jepang. Baik situasi pasca Perang Dunia II maupun setelah kecelakaan Fukushima, opini publik bergerak tajam ke arah penolakan akibat kekhawatiran terhadap jaminan keselamatan dan keamanan kelangsungan hidup masyarakat. Maka, perubahan situasi geopolitik global seperti invasi Rusia ke Ukraina juga menciptakan tekanan baru terhadap keamanan energi nasional dan memiliki potensi untuk memengaruhi opini masyarakat. Disrupsi energi global yang berdampak pada sektor energi dan ekonomi domestik kemudian mendorong Perdana Menteri Fumio Kishida untuk menggunakan jaminan keamanan dalam menampilkan citra tenaga nuklir sebagai sebuah solusi alih-alih sebagai ancaman. Kemudian, hasil survei Asahi Shimbun pada tahun 2023 menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya sejak kecelakaan Fukushima Daiichi, terjadi peningkatan dukungan publik terhadap rencana untuk dibukanya kembali pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir dengan total dukungan

51%, dan persentase suara yang menolak rencana tersebut sebssar 42% (World Nuclear News, 2023).

Kondisi antara disrupsi energi dan pergeseran opini masyarakat Jepang yang menjadi lebih positif terhadap reaktivasi nuklir memunculkan kesenjangan penelitian yang dapat diteliti dengan berfokus kepada bagaimana pemerintahan membingkai isu invasi Rusia ke Ukraina sebagai ancaman serius melalui tindak tutur, sehingga berkontribusi terhadap pergeseran opini publik terhadap reaktivasi tenaga nuklir sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Keputusan untuk mereaktivasi PLTN sebagai solusi mitigasi membuka potensi penelitian yang besar, karena meskipun Perdana Menteri Shinzo Abe membuka jalan bagi penggunaan kembali tenaga nuklir sebagai sumber energi, perubahan yang paling signifikan dalam upaya Jepang ini terlihat jelas pada masa Perdana Menteri Fumio Kishida.

Meskipun keamanan energi banyak dikaji dari sudut pandang kebijakan publik ataupun ekonomi energi, namun belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana pemerintah di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida berusaha membingkai krisis global sebagai ancaman terhadap keamanan energinya sehingga memerlukan legitimasi politik. Teori sekuritisasi Kopenhagen School menjadi pendekatan paling sesuai dalam membantu menganalisis retorika Kishida melalui tindak tutur dan strategi yang digunakan dalam menempatkan isu energi dalam kerangka sekuritisasi. Kishida memanfaatkan krisis energi dimanfaatkan untuk menguatkan urgensi terhadap reaktivasi energi nuklir sebagai hal yang kritis dan mendesak. Belum banyaknya literatur yang berfokus pada upaya sekuritisasi

keamanan energi selama era Fumio Kishida, menjadikan penelitian ini berpotensi untuk memberikan perspektif baru dalam pengembangan keilmuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, memunculkan pertanyaan ”Bagaimana pergeseran opini publik terhadap energi nuklir dalam proses sekuritisasi keamanan energi Jepang pada era Fumio Kishida?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida dalam diskursus keamanan energi. Analisis dilakukan untuk memahami pergeseran opini publik terhadap tindakan mitigasi yang diambil oleh pemerintah Jepang yang melibatkan pembangunan konstruksi wacana ancaman, peran *securitizing* dan *functional actors*, serta implikasi kebijakan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Fragmentasi opini publik yang muncul sebagai bagian dari pendekatan *top down* yang diterapkan oleh Fumio Kishida, menjadi poin yang menarik untuk dianalisis karena memperkuat kritik terhadap proses sekuritisasi isu energi. Melalui analisis terhadap penggunaan wacana ancaman, penelitian ini bertujuan secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang digunakan oleh pemerintah Jepang dalam proses sekuritisasi keamanan energi, sehingga

berkontribusi terhadap pergeseran opini publik khususnya selama pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan memperkaya literatur dalam lingkup Hubungan Internasional, khususnya kajian mengenai studi keamanan non-tradisional. Melalui studi kasus energi, penelitian ini berusaha untuk memahami upaya negara dalam mentransformasikan suatu isu menjadi sesuatu yang mengancam atau tidak mengancam terhadap keamanan pada sektor energi melalui strategi sekuritisasi. Dengan berfokus pada studi kasus keamanan energi Jepang, penjelasan secara akademis akan berusaha memaparkan hubungan antara faktor sosial masyarakat, kebutuhan energi, dan politik global, yang saling mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan suatu negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan *scientific analysis* bagi para akademisi dalam menganalisis upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh suatu negara. Proses sekuritisasi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya dalam rangka mengamankan rantai pasokan energi dengan tetap memenuhi komitmennya terhadap tanggung jawab iklim. Penelitian ini juga dapat menjadi pelajaran *(lesson learned)* bagi para pembuat kebijakan, perusahaan di bidang energi, hingga negara-

negara lain dalam merancang kebijakan yang lebih tangguh dan responsif untuk menghadapi desakan transisi energi dan target pemenuhan kebutuhan energi.

1.5 Tujuan Umum

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Peninjauan dan analisis terhadap penelitian terdahulu dengan spesifikasi isu kepada keamanan energi Jepang, menunjukkan fokus dan hasil penelitian yang beragam. Jurnal yang ditulis oleh Hanssen & Koppenborg (2023), menjelaskan bagaimana invasi Rusia terhadap Ukraina menimbulkan tantangan baru terhadap sektor militer dan energi Jepang. Setelah serangan tersebut, Jepang memperlihatkan respons yang lebih kuat di sektor militer dibandingkan sektor energi. Invasi Rusia ke Ukraina memicu respons keamanan Jepang yang sebelumnya cenderung pasif, mengalami pergeseran menjadi lebih reaktif pada sektor militer dibandingkan dengan sektor energi. Jurnal ini berpendapat bahwa alasan utama perbedaan tanggapan pada dua sektor tersebut karena adanya kecenderungan Jepang untuk semakin kuat mengamankan *'the China threat"* (Hanssen & Koppenborg, 2023). Invasi Rusia dinilai oleh para pembuat kebijakan di Jepang sebagai alasan yang masuk akal untuk mendramatisir langkah pertahanan melalui *speech acts* dan *extraordinary measures*.

Menurut Hanssen & Koppenborg (2023), pendekatan yang berbeda ditunjukkan oleh Jepang pada sektor energi, di mana Jepang tidak menempuh upaya besar-besaran untuk mengamankan sektor energinya dan cenderung bertindak lebih hati-hati. Penulis menjelaskan perbedaan respons antara militer dan energi ini melalui faktor Cina. Pada aspek pertahanan, Jepang berupaya menghadang

dominasi Cina semakin meluas khususnya di kawasan Asia Timur. Namun, transisi energi menuju terbarukan dinilai cukup berisiko karena adanya ketakutan bagi peningkatan ketergantungan Jepang terhadap perdagangan dengan Cina, yang mendominasi pasar energi terbarukan (Hanssen & Koppenborg, 2023). Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan *stance* yang lebih pesimis terhadap proses sekuritisasi Jepang pada sektor energi dengan menyebut bahwa program GX Kishida tidak menyediakan *roadmap* yang jelas dan kurang ambisius. Hal ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut dalam topik yang sama, namun dengan fokus yang lebih kepada dinamika pergeseran opini publik dan implementasi kebijakan nuklir hingga akhir masa jabatan Kishida.

Kajian mengenai diskursus energi di Jepang perlu disertai dengan pemahaman terhadap kompleksitas perubahan kebijakan energi Jepang dan keberadaan struktur kekuasaan yang berperan dalam merubah posisi, keyakinan, hingga *interest of dominant-group members*. Watanabe berusaha menjelaskan bahwa interaksi dari *the iron triangles*, sebuah jaringan yang tersusun atas birokrasi pada lingkup kementerian (METI), politisi konservatif (LDP), dan sektor industri energi Jepang, saling mempengaruhi dalam diadopsinya kebijakan *Feed-in Tariff* (FIT) pada 2011 (Watanabe, 2021). Politik energi Jepang dikenal cukup stabil dengan sedikit perubahan dengan dominasi kuat atas keyakinan lama terhadap nuklir dan energi fosil. Selaras dengan asumsi tersebut, perubahan yang bersifat inkremental terbatas dapat dilihat pada kebijakan seperti RPS *(Renewable Portfolio Standard*) pada 2003 dan *partial* FIT pada 2009. Namun, kecelakaan Fukushima Daiichi pada 2011, menjadi katalis yang penting bagi penerapan *full-scale* FIT yang

mendorong peningkatan kontribusi energi terbarukan dalam diversifikasi energi nasional. *Policy process theory* digunakan untuk menganalisis interaksi antara keyakinan dan kepentingan para aktor dominan dalam mendorong perubahan kebijakan skala besar. Studi ini menunjukkan bahwa fenomena *great shock* seperti bencana nuklir, dapat memaksa aktor konservatif untuk mengubah posisi mereka demi mempertahankan kekuasaan dan legitimasi, bahkan tanpa harus mengubah keyakinan normatif mereka (Watanabe, 2021).

Jurnal berikutnya yang ditulis oleh Takahiro Yamada (2021) menyoroti mengenai perubahan dinamika politik iklim di Jepang yang menekankan pada respon para pelaku di sektor bisnis, khususnya Keidanren, sebagai hasil dari proses kontruksi wacana terhadap isu perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah. Penggunaan teori sekuritisasi dari *Copenhagen School* dan metode analisis teks (KH Coder), menunjukkan bahwa peran aktor sekuritisasi, khususnya Ministry of Environment (MOE) yang diperkuat oleh koalisi lain, dinilai berhasil dalam membingkai perubahan iklim sebagai *existential crises* dan bentuk ancaman terhadap keamanan nasional Jepang (Yamada, 2021). Dalam konteks Jepang, perusahaan-perusahaan besar merespons kebijakan pemerintah yang mendorong dekarbonisasi dan transisi energi dengan membentuk aliansi dan mempromosikan narasi ekonomi hijau untuk menciptakan peluang bisnis baru (Higuchi, 2017) dalam (Yamada, 2021). Proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah telah mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk menyesuaikan kembali strateginya dalam mengadvokasikan kebijakan agar lebih mendukung dan menguntungkan bagi perusahaan. Meskipun penelitian ini mampu menjelaskan

hubungan kuat yang dihasilkan dari proses sekuritisasi oleh pemerintah Jepang terhadap para pelaku bisnis, namun pembahasan mengenai potensi *greenwashing* yang dilakukan perusahaan di bawah narasi iklim belum dieksplorasi secara lebih dalam. Selain itu, dengan penelitian yang dilakukan sebelum Perdana Menteri Fumio Kishida menjabat, penjelasan mengenai perubahan kebijakan terkini perlu mengalami aspek kebaruan.

Koppenborg & Hanssen (2021), dalam tulisannya yang berjudul *Japan's Climate Change Discourse: Toward Climate Securitisation?,* berusaha menganalisis penggunaan wacana oleh aktor negara dan non-negara dalam narasi terkait sekuritisasi iklim, dengan berupaya mengaitkan perubahan iklim terhadap bencana alam dan ketahanan energi. Tulisan ini mengungkap bahwa Ministry of Environment (MOE) menggunakan pendekatan yang secara eksplisit membingkai isu perubahan iklim sebagai sebuah krisis eksistensial. Sedangkan kementerian lain seperti Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) dan Ministry of Foreign Affairs (MOFA), menggunakan pendekatan yang lebih teknokratis dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa menekankan pada krisis atau perubahan yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Jepang mulai mengadopsi narasi perubahan iklim dalam skema sekuritisasi iklim, namun belum sepenuhnya terjadi proses sekuritisasi formal karena masih berada pada tahap diskursi, karena belum menjadi kebijakan yang konkret (Koppenborg & Hanssen, 2021). Proses sekuritisasi yang melibatkan pemerintah daerah, organisasasi masyarakat sipil, hingga parlemen, cenderung mengarah kepada sekuritisasi yang lebih moderat dengan menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara agresif terhadap pelaku

tertentu (Koppenborg & Hanssen, 2021). Meskipun proses sekuritisasi isu iklim berhasil menumbuhkan diskursus dalam skala yang kecil, namun kekosongan peran aktor kunci (pihak konservatif) menyebabkan para aktor sekuritisasi gagal untuk mengumpulkan dukungan dari pembuat kebijakan seperti perdana menteri dan METI. Temuan ini sejalan dengan temuan sebelumnya mengenai pentingnya keterlibatan perdana menteri untuk mewujudkan perubahan dalam wacana dan kebijakan iklim yang didominasi oleh METI di Jepang (Koppenborg & Hanssen, 2021). Berbeda dengan perdana menteri sebelumnya, Fumio Kishida mengambil langkah nyata yang lebih berani dan proaktif dengan mengemas isu perubahan iklim ke dalam kebijakan transisi energi yang melibatkan rencana dekarbonisasi di bawah skema *New Capitalism*.

Apabila penelitian sebelumnya meneliti mengenai tindakan pemerintah dan respon dari sektor bisnis, maka jurnal yang ditulis oleh Scott Valentine & Benjamin Sovacool (2019) mencoba menelaah persepsi dan penerimaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan energi nuklir di Jepang. Penulis menggunakan kerangka *change management theory* dalam mengembangkan empat tahapan dalam proses pembentukan opini public, yaitu: (1) *problematizing the issue,* (2) *create a foundation for supporting change,* (3) *reshape perceptions,* dan (4) *entrench support.* Melalui pendekatan analisis wacana, dalam beberapa narasi dominan pasca kejadian kecelakaan Fukushima 2011, negara berupaya menggunakan narasi keamanan energi yang dikaitkan dengan modernitas dan simbolisme nasional, untuk menormalisasi dan mempengaruhi publik terhadap penggunaan kembali nuklir. Hal ini tentunya melibatkan proses konstruksi ideologis dan upaya persuasif

pemerintah dalam memanipulasi opini publik melalui institusi, media massa, dan edukasi. Negara menggunakan narasi kepentingan nasional yang diatur dengan hati-hati untuk mendepolitisasi isu nuklir dan membingkai ulang isu tersebut sebagai masalah manajemen teknis (Valentine & Sovacool, 2019). Dengan narasi "Atoms for Peace", pemerintah mengubah trauma kolektif menjadi optimisme teknologi. Kemudian mengaitkan wacana ketergantungan terhadap energi nuklir dengan mengasosiakannya sebagai solusi yang aman dalam pencapaian stabilitas ekonomi nasional. Sementara narasi tentang nuklir yang dikaitkan dengan ketahanan nasional semakin dominan, wacana mengenai alternatif energi lain justru semakin melemah. Upaya-upaya pembangunan narasi yang dijelaskan pada jurnal ini berkontribusi bagi penulis dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran persepsi masyarakat yang cenderung lebih positif dalam wacana nuklir selama pemerintahan Fumio Kishida. Fumio Kishida kemudian berusaha membingkai isu nuklir dan transisi energi menjadi satu inisiatif di bawah Green Transformation (GX).

Penelitian-penelitian tersebut berkontribusi dalam memberikan pemahaman bahwa dalam beberapa tahun terakhir, diskursus energi di Jepang seringkali didominasi oleh upaya negara dalam membangun narasi energi menggunakan isu perubahan iklim. Upaya pemerintah Jepang tersebut selalu melibatkan aktor-aktor pemerintahan yang berwenang dalam membuat kebijakan di tingkat pusat seperti Perdana Menteri, kementerian-kementerian, dan partai politik, yang secara signifikan memainkan peran sentral dalam menentukan arah kebijakan dalam pencapaian keamanan energi nasional. Akibatnya, isu keamanan energi menjadi isu

ekslusif yang hanya menjadi perdebatan di tingkat pusat. Hal ini menimbulkan celah penelitian terhadap penggunaan wacana dalam upaya sekuritisasi keamanan energi selama pemerintahan Fumio Kishida yang cenderung lebih agresif baik di tingkat domestik maupun regional. Belum banyak penelitian yang memaparkan secara komprehensif mengenai bagaimana pemerintah Jepang berusaha mengkontruksi isu keamanan energi yang menyertakan respon publik terhadap dekarbonisasi dan energi nuklir. Meskipun penelitian Hanssen & Koppenborg (2023) merupakan pengecualian, tetapi penelitian tersebut dipublikasikan pada awal pemerintahan Fumio Kishida, yang tentu memerlukan unsur kebaruan terhadap kondisi riil hingga pemerintahannya berakhir pada 2024. Munculnya implikasi terhadap kemungkinan Perdana Menteri Fumio Kishida berusaha membingkai isu disrupsi global sebagai ancaman untuk mendapatkan legitimasi politik, mendorong analisis menggunakan teori sekuritisasi pada topik ini cukup menarik. Fragmentasi opini publik yang muncul sebagai respon terhadap kebijakan energi menjadi isu menarik yang akan memperkaya analisis terhadap proses sekuritisasi yang dilakukan Jepang selama pemerintahan Fumio Kishida. Penelitian ini akan memberikan perspektif baru mengenai agenda sekuritisasi dalam keamanan energi selama masa Perdana Menteri Fumio Kishida, yang menggunakan konstruksi wacana dalam melegitimasi tindakannya.

1.5.2 Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori sekuritisasi *Copenhagen School* yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Gagasan mengenai keamanan tradisional semula hanya berpusat

pada aktor negara yang melibatkan segala tindakan dalam ranah militer dan politik. Buzan kemudian mengkategorikan isu *non-traditional* ke dalam lima sektor yang mencakup militer, politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penolakan terhadap kaum tradisionalis dalam membatasi keamanan hanya pada sektor militer dan politik saja, mendorong perkembangan metode operasional konstruktivis dalam mengidentifikasi isu *non-traditional* melalui sebuah proses sekuritisasi. Sehingga keamanan tidak saja dilihat sebagai kondisi objektif, melainkan hasil dari proses kontruksi sosial. Sekuritisasi dapat didefiniskan sebagai langkah yang membawa politik di luar aturan main yang telah ditetapkan dan membingkai isu tersebut sebagai jenis politik khusus atau melampaui politik itu sendiri. Oleh karena itu, sekuritisasi dapat dilihat sebagai langkah yang ekstrim dari politisasi (Buzan et al., 1998).

Menurut Kurniawan (2018), terdapat tiga fitur umum konsep keamanan yang ditafsirkan oleh teori sekuritisasi. Pertama, isu apa pun dapat dikaitkan dengan *notion of threats,* apabila isu tersebut dianggap menimbulkan tantangan serius terhadap nilai-nilai fundamental yang dihargai oleh suatu komunitas atau negara. Kedua, tidak adanya konsensus universal mengenai definisi ’keamanan’. Yang terakhir adalah istilah ’keamanan’ sejatinya bersifat politis, yang berarti pemaknaan terhadap suatu isu sebagai ancaman keamanan sangat tergantung pada aktor yang menyuarakannya, serta strategi wacana yang digunakan untuk meyakinkan audiens. Hal ini menunjukkan bahwa sekuritisasi merupakan proses diskursif tentang bagaimana aktor mempresentasikan suatu isu sebagai sesuatu yang dapat

menimbulkan ancaman terhadap keberadaan *(existential)*, sehingga membutuhkan tindakan penanganan luar biasa.

Buzan et al, (1998) menyatakan bahwa studi sekuritisasi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang semakin tepat tentang siapa yang melakukan sekuritisasi, pada masalah apa *(threats),* untuk siapa *(referent object),* mengapa, dengan hasil apa, dan yang paling penting dalam kondisi apa (apa yang menjelaskan kapan sekuritisasi berhasil) (Özcan, 2013). Sekuritisasi memerlukan s*ecuritizing actor* sebagai pihak yang menyatakan bahwa suatu isu dianggap sebagai ancaman eksistensial dan membutuhkan upaya penanganan yang segera. Aktor ini umumnya memiliki kuasa dalam mendefinisikan ancaman terhadap keamanan, peran ini umumnya dilakukan oleh para pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, *lobbyists,* dan kelompok penekan. Bentuk ancaman yang dibingkai sebagai hal yang mendesak dan berpotensi mengganggu atau bahkan menghancurkan kelangsungan hidup dari suatu entitas dikenal sebagai *existential threat*. Pelabelan isu sebagai suatu ancaman tidak benar-benar objektif, melainkan dapat muncul akibat adanya persepsi sebagai sangat berbahaya. Sedangkan, target yang keberadaan atau kelangsungannya dianggap terancam dan memiliki klaim yang sah untuk bertahan dikenal sebagai *referent object* (Buzan et al., 1998). Kondisi tersebut akan mendorong adanya *act of securitisation,* yaitu serangkaian tindakan yang dapat meliputi penggunaan retorika, simbol, hingga *framing* yang kuat oleh para aktor untuk menyatakan suatu isu sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan. Yang terakhir adalah *audience,* yaitu pihak yang harus diyakinkan dan menjadi target dari proses sekuritisasi. Apabila aktor sekuritisasi berhasil meyakinkan audiens

sehingga mereka dapat membebaskan diri dari aturan atau prosedur yang mengikatnya, proses sekuritisasi dianggap telah berhasil (Prameswari, 2017).

Berbagai isu dapat dibangun dan diposisikan dalam spektrum tingkatan sekuritisasi mulai dari yaitu non-politis *(non-politicized),* politis *(politicized),* dan tersekuritisasi *(securitized)* (Buzan et al., 1998). Suatu isu berada pada tahap *non-politicised* ketika para aktor di tingkat pemerintahan menganggap tidak perlu adanya upaya penanganan karena isu tersebut tidak menjadi bagian dari perdebatan dan keputusan publik. Tahap *politicized* dapat terjadi ketika suatu isu mulai menjadi bagian dari perdebatan politik karena dianggap memiliki potensi yang mengancam dan kemungkinan untuk menyebabkan disrupsi, sehingga memerlukan alokasi sumber daya oleh pemerintah. Pertimbangan pada kemungkinan munculnya ancaman, akan mendorong para aktor untuk menggunakan bahasa dan retorika yang persuasif untuk meyakinkan *audience* bahwa isu tersebut cukup mendesak dan membutuhkan penanganan. Terakhir, adalah *securitized* yang artinya suatu isu tidak lagi menjadi agenda publik untuk diperdebatkan, melainkan isu tersebut telah disepakati sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan tindakan ekstrem dan pembenaran di luar batas politik normal untuk mengatasi ancaman tersebut (Buzan et al., 1998).

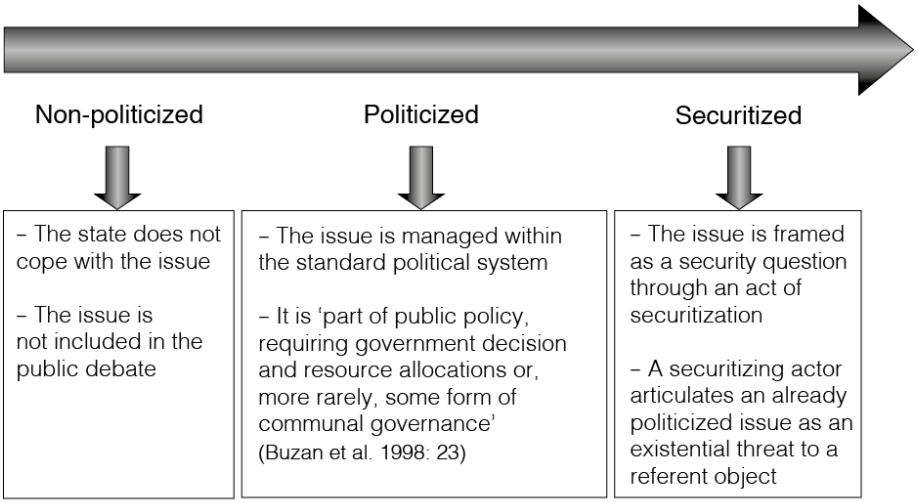

Gambar 1. 1 Tahapan Proses Sekuritisasi

Sumber: (Emmers, 2011)

Untuk membingkai suatu isu sebagai sesuatu yang mengancam, aktor sekuritisasi perlu mengartikulasikan isu tersebut kepada para audiens melalui *speech act* atau tindak tutur. Penting untuk memahami bahwa *speech act* tidak didefinisikan dengan penggunaan kata keamanan secara langsung dalam merujuk suatu isu, melainkan penunjukan ancaman eksistensial yang membutuhkan tindakan tindakan khusus dan penerimaan oleh audiens yang signifikan. Oleh karena itu, s*peech act* menjadi elemen fundamental dalam teori sekuritisasi. Melalui speech act inilah, aktor sekuritisasi mengangkat isu dari ranah politk biasa ke ranah keamanan, dengan maksud untuk memperoleh legitimasi atau kesamaan paham yang dapat digunakan untuk menjustifikasi pengambilan tindakan luar biasa. Banyak peneliti sepakat bahwa sekuritisasi merupakan tindakan performatif: ketika seorang aktor menyampaikan bahwa suatu ancaman eksis, maka pernyataan itu sendiri (bukan hanya fakta objektifnya) yang menciptakan makna ancaman. Sebagai contoh, ketika pemimpin politik menyatakan bahwa ketergantungan energi merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional, maka ucapan itu memiliki efek

politik yang konkret: isu tersebut diangkat ke tingkat prioritas tinggi, membuka jalan bagi kebijakan-kebijakan khusus di luar prosedur normal.

Menurut Buzan et al., (1998), keberhasilan dari *speech act* merupakan kombinasi dari bahasa dan masyarakat, di mana hanya ketika isu tersebut diterima oleh khalayak dan langkah-langkah darurat disahkan untuk melawan ancaman tersebut, maka isu tersebut akan sepenuhnya tersekuritisasi. Hal ini juga sejalan dengan Kurniawan (2018) yang setuju terhadap pendapat Floyd (2011), bahwa proses sekuritisasi akan lengkap ketika ada perubahan dari cara bertindak para aktor setelah melakukan *speech act.* Ketika kesamaan paham antara aktor sekuritisasi dengan para audiens tercapai, aktor sekuritisasi akan melakukan mobilisasi sumber daya *(fundings)* dan kewenangan *(measures, cooperation and alliances)* untuk mengatasi isu yang di sekuritisasi (Shah, 2024).

Audiens dalam proses sekuritisasi, bukanlah entitas yang pasif. Mereka memiliki peran dalam menentukan apakah klaim keamanan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi berhasil atau tidak. Bentuk perwujudan dari adanya dukungan terhadap tindakan luar biasa *(extrodinary measures)* dapat berupa pengesahan hukum darurat, atau tindakan legitimasi terhadap tindakan koersif yang dilakukan oleh negara.

Salah satu perhatian utama dalam kajian studi keamanan *non-traditional* masa kini adalah persoalan yang berkaitan dengan sektor energi. Dengan meningkatnya konflik di dalam wilayah energi, terbatasnya sumber pasokan, dan tingkat intervensi negara yang besar terhadap pasar energi, menjadikan isu energi secara bertahap menjadi terkait dalam pertimbangan terhadap keamanan dan

dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan negara (Özcan, 2013). Özcan (2013) juga berpendapat bahwa dalam proses sekuritisasi energi terkait dengan perilaku politik negara terhadap pasar energi yang tidak seimbang, yang dapat dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap objek referen terkait dengan kebijakan energi negara produsen, konsumen, maupun negara transit. Berdasarkan pada landasan tersebut, banyak penulis yang mulai menggunakan sekuritisasi sebagai alat analisis untuk mengetahui lebih dalam mengenai politik energi.

Analisis menyeluruh terhadap upaya Jepang dalam diskursus keamanan dan dinamika sekuritisasi energi tidak hanya akan berkontribusi dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap kesuksesan dan kegagalannya, tetapi juga terhadap berbagai tantangan dan ambiguitas pada sektor keamanan. Pemilihan teori sekuritisasi akan membantu memahami tentang bagaimana suatu isu dikonstruksikan dan dipersepsikan sebagai sebuah ancaman dalam ruang diskursif dan sosial tertentu. Demikianlah teori sekuritisasi akan membantu penelitian ini dalam mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen sekuritisasi dalam dinamika transisi energi Jepang khususnya selama pemerintahan Fumio Kishida yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap potensi ancaman.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif, peneliti berupaya untuk menjabarkan konsep-konsep yang akan diteliti secara jelas melalui penjabaran definitif pada bagian operasionalisasi konsep.

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Keamanan Energi

Menurut Klare (2013), keamanan energi didefinisikan sebagai jumlah seluruh pasokan energi yang dimiliki oleh suatu negara dan dijaga dalam kondisi yang stabil (Ramadhan, 2023). Meskipun keamanan energi sendiri belum memiliki konsep baku untuk mendefinisikannya, namun keamanan energi selalu berkaitan dengan pengadaan bahan bakar primer yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga mempengaruhi strategi kebijakan energi suatu negara di tengah persaingan dalam keterbatasan ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, teori sekuritisasi Kopenhagen School mengembangkan keamanan energi selalu berkaitan dengan keberadaan ancaman *(existential threat)* yang mengekspos kerentanan negara (Buzan et al., 1998). Ancaman dalam konteks keamanan energi dapat berbentuk kelangkaan atau gangguan pasokan energi, yang berpotensi membahayakan dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Liedtke, 2017). Dengan konsep keamanan energi yang selalu mengalami perkembangan, keamanan energi bukan lagi tentang *"survival in the face of existential threat,"* tetapi lebih melibatkan pertanyaan-pertanyaan moral dan etis mengenai keamanan energi yang seperti apa yang dapat diterima, sehingga menuntut langkah mitigasi yang tepat di luar ranah politik normal untuk menjamin eksistensi (Ramadhani, 2018).

1.6.1.2 *Existential Threat*

Existential threat menjadi salah satu konsep paling penting di dalam teori sekuritisasi. Istilah *existential threat* merujuk pada suatu ancaman yang dipersepsikan atau dikonstruksikan sebagai berbahaya terhadap eksistensi suatu

objek referensi *(referent object)*, seperti negara, identitas nasional, masyarakat, lingkungan, atau sistem ekonomi. Tujuan sekuritisasi tidak hanya untuk menilai apakah ancaman secara objektif mengancam keberadaan objek referensi; melainkan menciptakan pemahaman tentang apa yang dirasakan, dipertimbangkan, dan ditanggapi sebagai ancaman (Kalbuadi, 2020). Ancaman ini bersifat subjektif dan merupakan hasil dari proses konstruksi diskursif oleh aktor sekuritisasi yang menjustifikasi perlunya tindakan luar biasa *(extraordinary measures)* di luar praktik politik normal (Buzan et al., 1998). Dengan kata lain, penetapan *existential threat* terhadap sebuah *referent object* terjadi bersamaan dengan klaim untuk menggunakan tindakan luar biasa .

1.6.1.3 *Referent Object*

Kerangka teori sekuritisasi memberikan definisi terhadap r*eferent object* sebagai suatu entitas yang dianggap terancam dan harus dilindungi dari ancaman eksistensial (Buzan et al., 1998). Emmers (2004) meringkas *referent object* yang dimaksud menjadi: (1) negara, dalam konteks keamanan militer, (2) kedaulatan nasional atau ideologi, dalam hal keamanan politik, (3) ekonomi nasional, dalam hal keamanan ekonomi, (4) identitas kolektif, dalam hal keamanan masyarakat, dan (5) lingkungan, dalam hal keamanan lingkungan (Kurniawan, 2018). Entitas ini dinilai sebagai pusat perhatian dalam narasi sekuritisasi karena pembentukan asumsi bahwa ia memiliki nilai esensial dan vital bagi kelangsungan hidup komunitas politik, negara, masyarakat, atau sistem sosial. Melalui pembentukan persepsi dalam proses konstruksi sosial, *referent object* dibingkai sebagai sesuatu yang memerlukan tindakan luar biasa karena harus diselamatkan.

1.6.1.4 *Speech Act*

Dalam kerangka sekuritisasi, *speech act* atau tindak tutur adalah inti dari proses bagaimana sebuah isu dimaknai dan dibingkai sebagai ancaman eksistensial yang mendorong penciptaan realitas baru dengan penekanan bahwa isu tersebut merupakan masalah keamanan. Penting untuk diperhatikan bahwa *speech act* tidak didefinisikan melalui pengucapan kata keamanan secara eksplisit, tetapi poin utamanya terletak pada penunjukan ancaman eksistensial yang membutuhkan tindakan darurat atau tindakan khusus dan penerimaan dari tindakan tersebut oleh target audiens (Buzan et al., 1998). Balzacq (2015) dalam konteks sekuritisasi cenderung melihat *speech act* sebagai *performative character*, yang dapat dimaknai bahwa karakter tertentu tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah realitas sosial.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Keamanan Energi

Keamanan energi bagi Jepang merujuk kepada pencapaian kemandirian energi nasional dengan memastikan suplai energi yang stabil dapat menunjang kelangsungan ekonomi dan eksistensi negara itu sendiri. Sedikitnya sumber energi domestik dan tingginya tingkat ketergantungan terhadap impor energi menyebabkan gangguan sedikitpun terhadap rantai pasokan baik domestik maupun global akan menempatkan Jepang dalam posisi yang rentan terhadap krisis. Oleh karena itu, diskursus keamanan energi di Jepang telah lama didominasi oleh langkah-langkah efisiensi dan diversifikasi energi yang didukung atas pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, dan biomassa,

serta penggunaan energi nuklir. Kerentanan energi Jepang juga mengharuskan Jepang untuk menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara pengekspor energi dan berinvestasi di seluruh rantai nilai energi untuk memperkuat pasokan energinya. Sejalan dengan pemahaman Özcan (2013) mengenai sekuritisasi energi, penelitian ini akan difokuskan pada upaya pemerintah Jepang pada masa PM Fumio Kishida yang membingkai isu invasi Rusia ke Ukraina sebagai ancaman bagi keamanan energi nasionalnya, dengan mempertimbangkan perdebatan yang muncul akibat keputusan untuk menggunakan kembali energi nuklir.

1.6.2.2 *Existential Threat*

Existential threat dalam penelitian ini merujuk kepada isu transisi energi yang dikonstruksikan sebagai bagian dari diskursus keamanan energi nasional Jepang. Berdasarkan kerangka teori sekuritisasi dari Copenhagen School, suatu isu dapat dimasukkan ke dalam ranah keamanan apabila dikomunikasikan sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan atau eksistensi suatu *referent object*, seperti negara, masyarakat, atau sistem ekonomi. Dalam hal ini, transisi energi tidak hanya dilihat sebagai kebijakan lingkungan atau ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan strategis yang menyangkut ketahanan nasional Jepang.

1.6.2.3 *Referent Object*

Pengidentifikasian terhadap elemen-elemen sekuritisasi dalam penelitian ini menempatkan keamanan energi nasional Jepang sebagai objek yang terancam oleh munculnya *existential threat.* Keamanan energi nasional merupakan fondasi yang mendukung hampir semua sektor mulai dari industri, transportasi, hingga rumah tangga di Jepang, sehingga menjadikannya sangat penting untuk memastikan

keberlangsungan kehidupan di negara ini. Perlindungan terhadap keamanan energi Jepang melalui segala upaya, merupakan kunci untuk memastikan bahwa Jepang dapat terus beroperasi secara efektif dan menghadapi tantangan di masa depan.

1.6.2.4 *Speech Act*

Dalam penelitian ini, *speech act* yang akan digunakan merujuk pada pernyataan-pernyataan resmi baik yang disampaikan secara langsung seperti melalui pidato dan pernyataan publik oleh perdana menteri pada forum-forum, dan pernyataan tidak langsung yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah terkait seperti *website* resmi Kantor Perdana Menteri Jepang dan Kementerian-kementerian Jepang. *Speech act* juga berfokus pada analisis terhadap dokumen kebijakan dan keputusan pemerintah Jepang yang berkontribusi dalam membingkai isu terkait transisi energi, baik yang memengaruhi urusan dalam negeri ataupun tindakan resmi pemerintah pada urusan luar negeri di kawasan geopolitik global.

1.7 Bagan Alur Penelitian

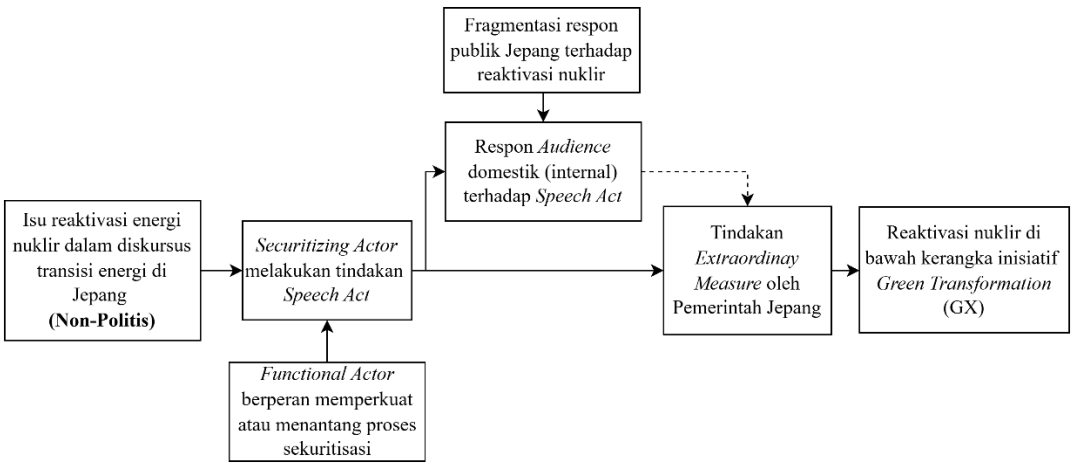

Gambar 1. 2 Skema Penelitian

Kerangka penelitian ini menggambarkan bagaimana isu reaktivasi energi nuklir di Jepang berkembang dari topik yang semula tidak mengalami politisasi, menjadi isu yang menempati posisi signifikan dalam diskursus keamanan energi nasional pasca invasi Rusia ke Ukraina mengikuti logika Teori Sekuritisasi *Copenhagen School*. Proses politisasi akan berfokus pada bagaimana Perdana Menteri Fumio Kishida selaku *securitizing actor* mengonstruksikan narasi ancaman. Dalam proses ini, *functional actor* berkontribusi dalam memperkuat ataupun menentang narasi sekuritisasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida. Mengingat reaktivasi nuklir merupakan isu yang kompleks, proses sekuritisasi terjadi secara tidak linier dimana para aktor dalam tataran politisasi dapat bekerja secara paralel dan sekuritisasi terjadi pada waktu yang sama. Dinamika ini menghasilkan respons publik Jepang yang terfragmentasi, dengan kecenderungan menjadi lebih positif. Setelah dukungan audiens yang cukup termobilisasi, pemerintah Jepang melegitimasi penerapan *extraordinary measure* berupa percepatan reaktivasi pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembentukan inisiatif Green Transformation (GX), yang menempatkan energi nuklir sebagai pilar strategis masa depan energi berkelanjutan dan aman Jepang dalam jangka panjang.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa meskipun Jepang seringkali menempatkan isu keamanan energi sebagai isu teknokratis atau bagian dari sektor ekonomi, pemerintahan Fumio Kishida menghadirkan perubahan naratif dengan membingkai isu ini sebagai bagian dari agenda keamanan nasional. Disrupsi energi global akibat invasi Rusia ke Ukraina memaksa Kishida untuk menyesuaikan arah kebijakannya

menjadi lebih agresif khususnya dalam mendorong reaktivasi pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai langkah mitigasi terhadap ancaman yang muncul. Untuk mendapatkan legitimasi yang lebih luas dari publik, Kishida menggunakan beberapa strategi seperti mengaitkan agenda reaktivasi energi nuklir dengan peningkatan biaya listrik domestik dan meletakkannya secara berdampingan dengan pengembangan energi terbarukan sebagai narasi alternatif yang strategis untuk mendukung keberhasilan upaya sekuritisasi sekaligus menjamin keamanan pasokan energi nasional. Namun, upaya sekuritisasi yang dilakukan secara proaktif oleh Fumio Kishida melalui pmemiliki keterbatasan, karena opini publik yang terpecah antara dukungan terhadap reaktivasi nuklir dan kekhawatiran terhadap jaminan keamanan dan keselamatan PLTN. Fragmentasi dan pergeseran opini publik terhadap tenaga nuklir menjadi latar penting bagi penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis proses sekuritisasi keamanan energi di Jepang, khususnya tentang bagaimana Fumio Kishida membingkai isu invasi Rusia ke Ukraina sebagai sebuah ancaman eksistensial terhadap keamanan energi nasional.

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara traingulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,

2013). Dengan sifatnya yang deskriptif, penelitian kualitatif cenderung dilakukan menggunakan analisis saksama terhadap kompleksitas kehidupan manusia, yang dipengaruhi oleh faktor tingkah laku dan sulit untuk diukur menggunakan angka. Terdapat lima strategi dalam penelitian kualitatif yaitu: etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Menurut Creswell & Poth (2017), studi kasus merupakan salah satu dari lima jenis utama penelitian kualitatif yang diterima dengan baik dalam penelitian kualitatif (Yin, 2018). Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Nurrisa & Hermina, 2025).

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk kepada lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui *desk research*, di mana pengumpulan data dan variabel yang relevan dilakukan berdasarkan sumber informasi yang terdapat pada media elektronik maupun non-elektronik.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Jepang dan lembaga pemerintahan di Jepang, yang secara spesifik meliputi Perdana Menteri, Kabinet, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Ministry of Foreign Affairs (MOFA), Liberal Democratic Party (LDP), lembaga energi nasional Jepang, hingga figur politik yang berwenang dalam merumuskan dan mempolitisasi isu energi di Jepang. Hal ini dikarenakan proses sekuritisasi dalam penelitian ini berfokus pada pembentukan narasi keamanan energi oleh aktor-aktor sekuritisasi dalam lingkup pemerintah

Jepang melalui *speech act.* Pendekatan *top down* yang digunakan oleh Jepang dalam mempolitisasi isu keamanan energi, menjadikan penelitian pada lingkup pemerintahan Jepang cukup relevan.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data ini merujuk kepada data *non-numeric* berupa frasa maupun teks yang menggambarkan atau merepresentasikan orang ataupun tindakan, visual (foto, video), dan sumber informasi deskriptif lainnya yang berfokus untuk mengeksplorasi aspek kualitas, karakteristik, dan konsep. Penggunaan data kualitatif tersebut didasarkan pada faktor kebahasaan yang bertujuan untuk mendapatkan makna berdasarkan pengalaman, persepsi, dan perilaku partisipan. Data kualitatif ini akan berkontribusi dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa dalam penelitian.

1.9.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari teks, artikel, laporan, literatur, dan *website* resmi dengan sumber data yang kredibel dan valid. Penekanan terhadap wacana oleh aktor sekuritisasi memperluas jangkauan sumber data ke media ataupun forum publik yang berisikan pernyataan resmi dari aktor kunci dan lembaga pemerintahan terkait. Data sekunder juga didapatkan melalui dokumen-dokumen baik resmi maupun tidak resmi seperti *Japan Basic Energy Plan*, *Green Transformation (GX) Basic Plan*, hingga pidato kebijakan tahunan yang menjadi sumber data yang dianalisis secara mendalam.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini dilakukan melalui *desk research*, yakni pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber sekunder tanpa keterlibatan langsung di lapangan. Teknik ini mencakup studi terhadap hasil wawancara, analisis tekstual, observasi tidak langsung terhadap dokumentasi media, dan *case studies* yang relevan. Selain pertimbangan efisiensi biaya, pemilihan metode *desk research* juga dipengaruhi oleh jarak geografis yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam meskipun tidak terjun secara langsung ke lokasi penelitian yang berada di Jepang. Penghimpunan material didapatkan dari dokumen kebijakan dan laporan pemerintah Jepang baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Jepang yang dapat diakses melalui terjemahan, *scientific journal* yang relevan, buku, *official websites,* dan media elektronik yang memuat penyampaian wacana yang kredibel.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan tahap kritis dan menentukan dalam proses penelitian kualitatif, karena digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data, sehingga hipotesis dan pernyataan dapat dikembangkan dan dievaluasi (Sugiyono, 2013). Analisis data pada penelitian ini adalah analisis diskursus. Analisis diskursus adalah alat penting untuk memahami bagaimana diskursus dapat membentuk persepsi publik dan mengubah pandangan tentang isu sosial-politik tertentu (Fairclough, 2013). Menurut Van Dijk (2013), analisis diskursus terdiri dari beberapa tahap, termasuk identifikasi tema utama, pengamatan struktur teks, dan analisis makna yang tersurat dan tersirat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

untuk menelusuri pola komunikasi dan narasi yang membingkai transisi energi sebagai isu keamanan nasional, sesuai dengan kerangka konseptual teori sekuritisasi dari *Copenhagen School.*

1.9.8 Kualitas Data

Data sekunder yang digunakan berasal dari *platform* dan sumber resmi *(official)* maupun tidak resmi yang kredibel dan dapat dipercaya. Pencantuman sumber data pada bagian daftar pustaka merupakan bentuk kontribusi dari peneliti dalam membuktikan kebenaran data.